



EKONOMI BIRU
INDONESIA MAJU

KKP
2025

panganbiru

08
PUSKES
SIMPUL

BPP
MHKP

BerAKHLAK
SUKSES MELAKUKAN TRANSFORMASI
BERSAMA SAMA MELAKUKAN TRANSFORMASI

SAMPULIR

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TENGAH

2024



BPP
MHKP

KALIMANTAN TENGAH

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP PALANGKA RAYA,

2025



EKONOMI BIRU
INDONESIA MAJU

KKP
2025

panganbiru

08
PERINTA (2024)

BPP
MHKP

BerAKHLAK
BerAKHLAK

SAMPULIR

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TENGAH

2024



BPP
MHKP
KALIMANTAN TENGAH

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP PALANGKA RAYA,
2025

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tiada batas dan hanya patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan segala ijin dan Karunia-Nya, sehingga BPPMHKP Kalimantan Tengah kembali dapat menyusun laporan kegiatan tahunan dalam bentuk "Laporan Tahunan BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024".

Laporan Tahunan ini berisikan tentang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024 antara lain : kegiatan pelayanan administrasi Tata Usaha, kegiatan pengawasan dan pengendalian, pelayanan teknis dan kegiatan pejabat fungsional serta berbagai kegiatan lainnya yang seluruhnya dimaksudkan sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada stake holders.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama proses penyusunan laporan ini.

Khilaf dan salah adalah manusiawi, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami menyadari masih terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan dari penyusunan laporan ini. Sumbang saran dan kritikan yang sifatnya membangun akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga setiap apa yang kita kerjakan mendapat berkah dan ridho-Nya dan semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang membutuhkannya.



Palangka Raya, Januari 2025
BPPMHKP Kalimantan Tengah
Kepala,

Miharjo, S.St.Pi, M.M
NIP. 19790101 200312 1 003

RINGKASAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kalimantan Tengah merupakan salah satu UPT dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP) yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tanggung jawab sebagai salah satu UPT BPPMHKP adalah berperan menjaga kualitas mutu dan keamanan hasil perikanan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, juga tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi dan produk perikanan. Oleh karena itu, BPPMHKP Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerjanya dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

Sebagai instansi pemerintah, BPPMHKP Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Tahunan yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya BPPMHKP Kalimantan Tengah telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama tahun 2024.

KEMENTERIAN PERIKANAN
INDONESIA

KIPM

KALIMANTAN

08

BPP

BerAKHLAK

SAMPUL

LAPORAN KINERJA BADAN MUTU KKP KALIMANTAN TENGAH, TAHUN 2024

No.	Uraian	%	Target/ Capaian
01	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	120%	70/100
02	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100%	70/120
03	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	118,71	70/83,1
04	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	100	1/1
05	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	-	75/0
06	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	100,98	82/82,8
07	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	120%	80/100
08	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	105,43%	80/84,34
09	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	-	70/0
10	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	103,69%	88/88
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	104,85	93,75/98,31
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	120	71/100
13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100	100/100
14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	-	87/0

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah telah dengan hasil capaian 120% yaitu dengan tersertifikasinya kolam pembesaran ikan air tawar milik Bapak Samsuddin yang berada di Kota Palangka Raya dan untuk permohonan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) terlaksana sebanyak 6 sertifikat dan sertifikasi HACCP terlaksana 1 sertifikat.

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah terus berkontribusi dalam pelaksanaan uji profisiensi, dari 3 sampel yang diujikan seluruhnya diperoleh hasil yang "BENAR". Capaian indikator mutu laboratorium pengujian dihasilkan sebesar 118,71%.

Aplikasi "SAMPULIR" sebagai salah satu bentuk pelayanan public yang dilembangkan selama tahun 2024, hal ini merupakan kelanjutan dari aplikasi si CANTIK yang diharapkan dengan aplikasi ini, pelaku usaha perikanan dari hulu ke hilir akan sangat mudah dalam proses pengajuan sertifikasi.

Beberapa kendala dan permasalahan dihadapi selama tahun 2024, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian laporan hasil kegiatan tahun 2024 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan BPPMHKP Kalimantan Tengah banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	9
BAB II PROFIL	10
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	11
2.2. Wilayah Kerja	14
2.3. Struktur Organisasi	15

BAB III KEGIATAN OPERASIONAL

17

3.1. Inspeksi/Surveilans CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

18

3.2. Monitoring Evaluasi HACCP

23

3.3. Laboratorium Penguji

27

3.3.1. Level Laboratorium

29

3.3.2. Visi dan Misi Laboratorium Penguji

29

3.3.3. Struktur Organisasi Laboratorium Penguji

30

3.3.4. Manajemen Mutu ISO 9001

32

3.3.5. Uji Profisiensi Laboratorium

33

3.4. Pelayanan Publik

37

3.4.1. Inovasi Pelayanan Publik

41

3.5. Survey Kepuasan Masyarakat (TKM) & Penanganan Pengaduan

48

3.5.1. Survey Kepatuhan Pelanggan

41

3.5.2. Kerjasama

41

3.5.3. Penghargaan

41

BAB IV ADMINISTRASI & KEUANGAN

61

4.1. Ketatausahaan

62

4.1.1. Surat Menyurat

32

4.1.2. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

32

4.2. Kepegawaian

73

4.2.1. Profil Pegawai

75

4.2.2. Calon PNS di Kantor SKIPM Palangka Raya

77

4.2.3. Pengembangan Profesi

78

4.3. Keuangan

80

4.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

80

4.3.2. Realisasi Anggaran

81

4.3.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

83

4.3.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

83

BAB V PERMASALAHAN & USULAN	86
5.1. Permasalahan	86
5.2. Usulan	87
BAB VI PENUTUP	88
LAMPIRAN - LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Peta Kalimantan Tengah	1
Letak Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya, Wilker Sampit dan Wilker Pangkalan Bun terlihat dari Satelit saat masih dibawah naungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	2
SKIPM Palangka Raya, Wilker SAMPIT, Tahun 2000 – sekarang	4
SKIPM Palangka Raya, Wilker PANGKALAN BUN, Tahun 2000 – sekarang	4
Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya, 2000 – 2010	5
Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya, 2010 – 2024	5
Kegiatan apel pagi Briefing, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan do'a bersama	6
Breafing pagi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP Kalimantan Tengah	7
Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	10
Kantor UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah	11
Struktur organisasi dan Tata Kerja BPPMHKP Kalimantan Tengah sejak adanya pemisahan lembaga	15

Struktur organisasi dan Tata Kerja BPPMHKP Kalimantan Tengah sejak adanya pemisahan lembaga	15
Kantor UPT, Wilker Sampit dan Wilker Pangkalan Bun, saat masih berada dalam satu lembaga BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan	16
Kegiatan Inspeksi / Surveilans oleh Tim Instruktur Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, 2024	21
Peta lokasi Kegiatan Inspeksi / Surveilans oleh Tim Instruktur Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, 2024	22
Penyerahan sertifikat HACCP oleh Kepala BPPMHKP Ibu Ir. Ishartini, bersamaan dengan kegiatan Seminar Nasional di Aula Universitas Palangka Raya kepada pelaku usaha perikanan yang konsisten menerapkan sistem HACCP dalam usaha budidaya ikan betutu di Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 22 Mei 2025	24
Pengujian formalin terhadap sampel ikan asin yang diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan kesegaran ikan di pasar tradisional Kota Palangka Raya, yang dinyatakan positif mengandung formalin	28
Pengujian organoleptik pada sampel udang dan ikan oleh Tim penguji laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah bersama Mahasiswa Universitas Palangka Raya yang melaksanakan magang	31
Sertifikat SNI dan QAI dari Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diperoleh Stasiun KIPM Palangka Raya tahun 2024.	32

Pelaksanaan uji profisiensi oleh tim penguji laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah, pada bulan Juli tahun 2024 dengan 3 (tiga) parameter uji

34

Pelaksanaan uji profisiensi oleh tim penguji laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah, pada bulan Juli tahun 2024 dengan 3 (tiga) parameter uji

36

BPPMHKP Kalimantan Tengah terus bersinergi memberikan layanan dan informasi ke berbagai instansi di Prov. Kalimantan Tengah

38

Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor BPPMHKP Kalimantan Tengah yang dipajang di ruang pelayanan

40

Aplikasi SAMPULIR yang dikembangkan dari aplikasi SiCANTIK

41

Aplikasi SAMPULIR merupakan salah satu inovasi layanan publik yang dikembangkan oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah di tahun 2024

42

Tugas, Fungsi, Tujuan, Prinsip, Standar Layanan dan Struktur Organisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BPPMHKP Kalimantan Tengah

44

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2024 oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah seluruhnya dalam kategori A "Sangat Baik"

49

Sosialisasi CPIB dan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama Diskan Kab. Kotawaringin Timur-Sampit

51

Sosialisasi CPIB dan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama Diskan Kab. Kotawaringin Barat – Pangkalan Bun	52
Dokumentasi kegiatan Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha terhadap SOP yang berlaku di Badan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sekaligus penyerahan sertifikat CBIB dan HACCP kepada pelaku usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah	53
Pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan agar mudah memperoleh sertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	53
Dokumentasi kegiatan kerjasama antara BPPMHKP Kalimantan Tengah bersama SMKN 5 Palangka Raya, Universitas Kristen Palangka Raya dan Universitas Palangka Raya	56
Dokumentasi kegiatan K3 (Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama) bersama berbagai instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah	59
Piagam Penghargaan dari Kantor KPPN Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024.	60
Kegiatan apel pagi setiap senin pagi oleh Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah	61
Kegiatan pengarsipan terhadap arsip aktif dan in aktif	63

Dokumentasi pemusnahan arsip di BPPMHKP Kalimantan Tengah yang dilakukan sesuai jadwal retensinya dan sesuai dengan SOP pemusnahan arsip

66

Ruang arsip aktif dan in aktif BPPMHKP Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kearsipan

66

Peralatan laboratorium untuk pengujian mutu produk hasil perikanan yang merupakan bagian dari BMN (Barang Milik Negara) yang dimanfaatkan dengan sangat baik

67

Fasilitas sarana dan prasarana di ruang aula BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

69

Pelaksanaan apel pagi secara offline dan virtual bersama Kepala BPPMHKP Ibu Ir. Ishartini

74

Pelaksanaan (pengujian sampel di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah, menggunakan biaya dari APBN tahun 2024 sesuai termaktub dalam DIPA.

81

Pelaksanaan pelatihan oleh seluruh pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai upaya meningkatkan IP ASN.

85

Gedung SKIPM Palangka Raya dari masa ke masa

89

Meski instansi tak lagi bersama, namun sinergi kan terus terjalin tanpa kata akhir, demi Kalteng kita maju bersama

90

DAFTAR TABEL

Tabel Hasil Pengujian parameter <i>Eschericia coli</i> pada kegiatan uji profisiensi di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024	35
Tabel Hasil Pengujian Parameter <i>Salmonella</i> pada kegiatan uji profisiensi di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024	35
Tabel Hasil Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) pada kegiatan uji profisiensi di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024	36
Tabel Daftar koleksi buku perpustakaan UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah, tahun 2024	45
Tabel Pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha eksportir di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah Semester I (Januari–Juni 2024) dan Semester II (Juli–Desember 2024)	50
Tabel Pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha Domestik Keluar di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah Semester I (Januari–Juni 2024) dan Semester II (Juli–Desember 2024)	50
Tabel Pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha Domestik Keluar di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah Semester I (Januari–Juni 2024) dan Semester II (Juli–Desember 2024)	51
Jenis dan jumlah surat masuk dan surat keluar di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024	64
Jenis dan jumlah surat masuk dan surat keluar di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024	68

Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024)	68
Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024)	69
Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024	70
Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2020–2024 (5 tahun terakhir)	71
Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada SKIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024)	71
Ringkasan BMN Hilang Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024)	72
Jumlah pegawai di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024	75
Jumlah Pegawai ASN di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikannya tahun anggaran	76
Data pegawai Honorer/Kontrak di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024	77
Pegawai di BPPMHKP Kalimantan Tengah yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2024	78
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2020 – 2024	80

Jenis belanja DIPA di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 (Per 31 Desember 2024).

81

Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada tahun 2024

82

Perbandingan target dan realisasi PNBK UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga 2024

83

DAFTAR LAMPIRAN

Jenis belanja DIPA di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 (Per 31 Desember 2024).

91



LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TENGAH





**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TENGAH**

**Jl. Adonis Samad,
Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya
Prov. Kalimantan Tengah**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara – 3°30' Lintang Selatan dan 111° – 116° Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km² atau 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua (153.564 km²).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sebesar 153.564,5 km² yang menjadikannya sebagai Provinsi terluas di Indonesia setelah Provinsi Papua dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru pada tahun 2022. Secara astronomis, Kalimantan Tengah terletak di antara 0°46' lintang utara hingga

Peta Kalimantan Tengah



3°33' lintang selatan dan 110°51' hingga 115°50' bujur timur. Bagian utara provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Pegunungan Muller Schwaner yang terdiri atas 52 bukit dengan ketinggian bervariasi, yaitu dari ketinggian 343 mdpl seperti Bukit Ancah sampai 2278 mdpl seperti Bukit Raya.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan, dengan ibu kotanya Palangka Raya. Julukan dari provinsi ini adalah Bumi Tambun Bungai. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2022 (kaltengbps.go.id) jumlah penduduk yang menghuni di Kalimantan Tengah sebesar 2.709.950 Jiwa.

Letak Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya, Wilker Sampit dan Wilker Pangkalan Bun terlihat dari Satelit saat masih dibawah naungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Masyarakat Kalimantan Tengah merupakan masyarakat yang plural yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya dan agama. Secara umum ada tiga etnis dominan yang bermukim diseluruh Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Etnis dayak (46,62%), etnis Jawa (21,67%) dan etnis Banjar (21,03%). Secara umum etnis Dayak bermukim di daerah hulu atau pedalaman, sedangkan etnis Jawa menempati daerah transmigrasi dan perkotaan, adapun etnis Banjar menempati wilayah pesisir dan perkotaan.

Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah gugus kepulauan Indonesia. Sebagai Provinsi terluas kedua di Indonesia, daerah ini menyimpan sejuta pesona. Mulai dari alam, orang utan, hingga kehidupan penduduk asli suku Dayak yang lengkap dengan upacara adatnya hingga kisah kepahlawanan Tijilik Riwit yang dikenal dengan ketampanannya.

Di sebelah utara, Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Murung Raya tercatat sebagai kabupaten terluas di Kalteng, yaitu 23.700 km² atau sekitar 15 persen dari luas Kalimantan Tengah. Sedangkan kabupaten terkecil di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dengan luas 3.827 km² atau sekitar 2,4% dari total luas Kalteng. Daerah Kalimantan Tengah terbagi atas tiga bagian yang membentang dari barat ke timur dan utara ke selatan. Bagian Selatan terdiri dari daerah pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian 0–50 meter di atas permukaan laut.

Bagian tengah merupakan dataran perbukitan dengan ketinggian 50–150 meter di atas permukaan laut. Bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian di atas 150 meter di atas permukaan laut.

Kalimantan Tengah memiliki 11 sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km

dengan rata-rata kedalaman 8 meter merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 kilometer. Sungai besar lainnya adalah Sungai Kahayan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 250 km dan bermuara di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Kalimantan Tengah dikenal dengan daerah dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Hasil alam Kalimantan Tengah sudah dikenal secara luas, baik pasar nasional maupun Internasional. Salah satunya adalah produk komoditas perikanan. Berdasarkan data dari BPS Kalteng, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perairan umum dengan luasan $\pm 2.333.077$ Ha dimana 2.267.800

SKIPM Palangka Raya, Wilker SAMPIT. Tahun 2000 - sekarang



SKIPM Palangka Raya, Wilker PANGKALAN BUN. Tahun 2000 - sekarang



Ha merupakan daerah perairan tawar yang terdiri dari rawa seluas 1811500 Ha, sungai 323.500 Ha (59 buah) dan danau seluas 132.800 Ha. Perairan yang luas tersebut menghasilkan berbagai komoditas perikanan hasil tangkapan air tawar seperti ikan peyang (*Channa maruloides*), botia (*Chromobotia macachantra*), betutu (*Oxyleotris marmorata*). Ada juga komoditas tangkapan air payau & laut seperti kepiting bakau (*Scylla serrata*), daging rajungan (*Portunus pelagicus*), bawal putih (*Pampus argenteus*) dll. Kemudian ada juga komoditas budidaya berupa udang vannamei dari Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara.

Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya, 2000 - 2010



Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya, 2010 - 2024



Dengan adanya potensi perikanan yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Tengah, menjadikan tantangan bagi kita semua untuk dapat

Kegiatan apel pagi Briefing, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan do'a bersama



mengeksploitasinya dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan tentunya tetap dalam pengawasan agar pengelolaannya terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran penting Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah terhadap pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sejalan dengan visi pembangunan kelautan perikanan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020–2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong". Misi pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2024 mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020–2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan

Breafing pagi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP Kalimantan Tengah



4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat
 - c. Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat
 - e. Pengelolaan ruang laut optimal
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :
Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni:

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat

Pencapaian kegiatan dan program kelautan dan perikanan tahun 2024 tidak lepas dari peranan dan fungsi Badan Mutu KKP Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP sebagai subsektor perikanan yang berperan menjaga mutu produk perikanan aman dikonsumsi masyarakat.

Sesuai dengan amanat BPPMHKP yang dituangkan pada Visi dan Misi "Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan

dan perikanan". Misi Badan Mutu KKP 2024 adalah meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan, meningkatkan penerapan praktik baik di rantai pasok, mewujudkan sistem jaminan mutu, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Mutu sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menetapkan perubahan nama dan fungsi BKIPM menjadi BPPMHKP. Selain itu, beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) juga mengatur aspek-aspek teknis terkait mutu dan keamanan hasil perikanan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017.

12. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, evaluasi sekaligus memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan teknis operasional maupun administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan (BMN) dalam bentuk keberhasilan maupun permasalahan yang ada pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selama tahun 2024, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pada tahun mendatang. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dan menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BAB II

PROFIL

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menetapkan perubahan nama dan fungsi BKIPM menjadi BPPMHKP. Selain itu, beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) juga mengatur aspek-aspek teknis terkait mutu dan keamanan hasil perikanan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017. Dalam regulasi tersebut disebutkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kantor UPT Stasiun KIPM Palangka Raya



Kantor UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah



Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (setingkat Eselon IV.a) dibantu 3 (tiga) orang Pelaksana Koordinator (setingkat Eselon V). Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah terurai sebagai berikut :

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menetapkan perubahan nama dan fungsi BKIPM menjadi BPPMHKP memiliki tugas pokok :

"Menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Fungsi ini mencakup pengendalian dan pengawasan mutu sejak proses budidaya hingga pengolahan atau pasca panen. Selain itu, Badan Mutu KKP juga berperan dalam menyusun kebijakan teknis dan program pengendalian dan pengawasan mutu. "

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

1. Menjamin Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan: Melakukan inspeksi dan pengujian untuk memastikan produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan.
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu : Mengawasi seluruh proses produksi, mulai dari budidaya hingga pemasaran, untuk memastikan mutu produk terjaga.
3. Penyusunan Kebijakan dan Program : Mengembangkan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
4. Koordinasi dan Kolaborasi : Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, lembaga riset, dan pelaku industri, untuk meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Penyuluhan dan Pengembangan SDM : Menyuluhkan masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan, serta memberikan pelatihan dan pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
6. Meningkatkan Daya Saing : Memastikan produk perikanan Indonesia berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar global.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Badan Mutu KKP berperan penting dalam memastikan bahwa hasil kelautan dan perikanan Indonesia aman, berkualitas, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Dari tugas dan fungsi tersebut diatas, maka BPPMHKP Kalimantan Tengah mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. dengan uraian sebagai berikut :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
3. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
4. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

6. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)
7. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (nilai)
8. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)
9. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)
10. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barangjasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)
13. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

2.2 WILAYAH KERJA

Sejak terjadi pemisahan lembaga antara Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, maka sejak awal tahun 2024, Badan Mutu KKP

Kalimantan Tengah yang merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Kalimantan Tengah, BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lagi memiliki wilayah kerja karena seluruh wilayah kerja merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi BKHIT Kalimantan Tengah

2.3. STRUKTUR ORGANISASI

BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi BPPMHKP Kalimantan Tengah terdiri dari :



Struktur organisasi dan Tata Kerja BPPMHKP Kalimantan Tengah sejak adanya pemisahan lembaga

- a. Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi tercantum pada gambar berikut :

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi BPPMHKP Kalimantan

Tengah antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Kantor UPT, Wilker Sampit dan Wilker Pangkalan Bun, saat masih berada dalam satu lembaga BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB III KEGIATAN OPERASIONAL

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah menetapkan UU Pelayanan Publik untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik serta mempertegas pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara.

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Menurut UU Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan No.8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dilakukan sesuai SOP yang berlaku dan dilakukan dengan cepat, cermat, transparansi dan akuntabel serta bersimpati sehingga memberikan keramahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa.

Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan saat ini, bukan hanya terkait pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tetapi juga bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Sebagaimana tuntutan masyarakat domestik dan internasional terhadap kelestarian sumberdaya hayati, produk perikanan yang berkualitas serta terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Berikut beberapa kegiatan menyangkut kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.1 INSPEKSI/SURVEILANS CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

Sertifikasi CBIB menjadi strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan budidaya di pasar global.

CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) adalah prinsip budidaya ikan yang bertujuan untuk menghasilkan ikan dengan kualitas terbaik dan aman dikonsumsi, sembari menjaga kesehatan ikan, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan.

CBIB merupakan praktik yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. Implementasi CBIB mencakup berbagai aspek, termasuk sanitasi, pakan, obat-obatan, penggunaan bahan kimia, dan faktor biologis, serta memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan ikan, tanggung jawab lingkungan, dan aspek sosial ekonomi.

CBIB bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil budidaya ikan, serta meningkatkan kualitas ikan. CBIB mencakup seluruh proses budidaya, mulai dari persiapan lahan, pemberian pakan, pengobatan, hingga panen.

Prinsip kerja CBIB adalah dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat-obatan, bahan kimia, dan faktor biologis, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan kesejahteraan ikan, tanggung jawab lingkungan, dan sosial ekonomi.

Manfaat dari pelaksanaan CBIB adalah dihasilkannya produk ikan yang aman dan berkualitas tinggi, sehat dan bermutu, lingkungan terjaga yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global.

Penerbitan sertifikat CBIB dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada unit pembudidaya ikan yang telah memenuhi persyaratan dengan mengikuti prosedur sertifikasi CBIB dengan mengajukan permohonan

sertifikasi CBIB melalui Sistem OSS (Online Single Submission) atau Dinas Provinsi jika Sistem OSS mengalami kendala teknis.

Adapun persyaratan Sertifikasi CBIB adalah Pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), data unit pembesaran ikan, layout bangunan, struktur organisasi, SOP (Standard Operating Procedure) pencatatan pembesaran ikan, dan lain-lain.

Selama tahun 2024, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan sertifikasi CBIB di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Kolam Pembesaran Ikan Air Tawar di Jl. G. Obos, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang merupakan usaha Mikro milik Samsudin.

Usaha ini berdiri sejak bulan Januari tahun 2023. Komoditas perikanan yang dikembangkan berupa ikan nila dan ikan lele Dimana benih diperoleh dari Kota Banjarmasin.

Secara keseluruhan setelah dilakukan inspeksi / surveilans oleh Tim Inspektur Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah dengan mempertimbangan seluruh kegiatan yang telah sesuai dengan SOP dalam pelaksanaan kegiatan budidaya mengangkut fasilitas, sarana prasarana, dokumen, dll, maka, pada tanggal 30 Desember tahun 2024, diterbitkan Sertifikat CBIB (Cara Budidaya

Ikan yang Baik) dengan nomor sertifikasi PB-UMKU ; 041224005497600010001 yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang akan berlaku selama 4 tahun ke depan.

Selama unit usaha tersebut berjalan, Tim Inspeksi Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar unit budidaya tersebut tetap konsisten menerapkan SOP. Kegiatan inspeksi/surveilans ini akan terus dilaksanakan ke beberapa unit usaha perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah demi mendukung program sertifikasi jaminan mutu produk perikanan agar produk perikanan yang dihasilkan merupakan produk perikanan yang sehat dan bermutu.



Kegiatan Inspeksi / Surveilans oleh Tim Instruktur Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, 2024

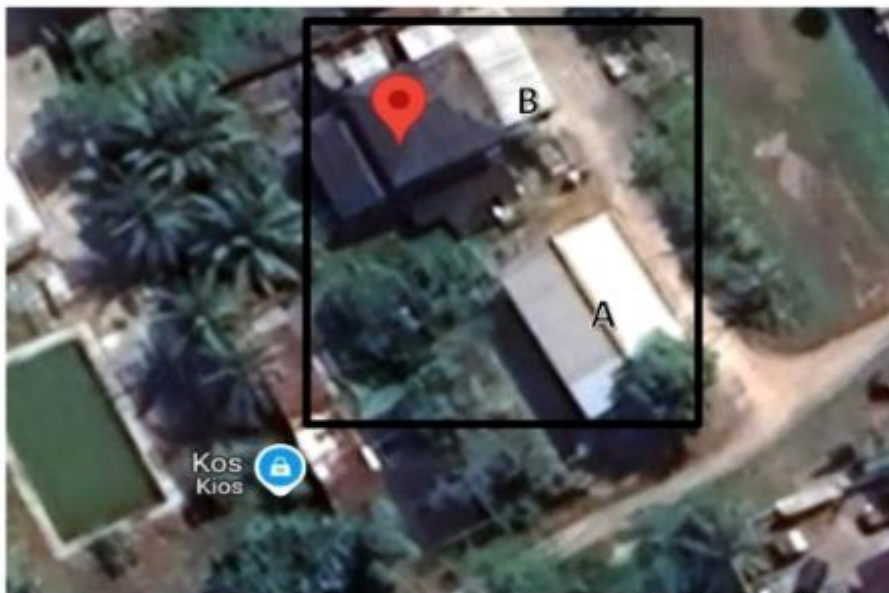




DENAH LOKASI

SAMSUDIN

JL. G. OBOS , Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah



Peta lokasi Kegiatan Inspeksi / Surveilans oleh Tim Instruktur Mutu
BPPMHKP Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, 2024

3.2. MONITORING EVALUASI HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) adalah sistem manajemen mutu terpadu yang diterapkan dalam kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan untuk memastikan keamanan pangan. Penerapan HACCP bertujuan untuk mengendalikan bahaya, baik fisik, kimiawi, maupun mikrobiologis, yang mungkin muncul selama proses produksi.

HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan yang sistematis dan berbasis risiko, yang mengidentifikasi bahaya dan titik kendali kritis (CCP) untuk mengontrol bahaya tersebut. Tujuan HACCP adalah ; Mencegah kerusakan dan kontaminasi pada produk perikanan, memastikan produk perikanan aman untuk dikonsumsi dan untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ditetapkan.

HACCP terdiri dari 7 prinsip dasar, yaitu :

- ☞ Analisis Bahaya: Mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan.
- ☞ Penentuan Titik Kritis: Menentukan titik-titik dalam proses yang perlu dikontrol untuk mencegah bahaya.
- ☞ Penetapan Batas Kritis: Menetapkan batas-batas yang dapat diterima untuk setiap titik kritis.
- ☞ Prosedur Pemantauan: Menetapkan prosedur untuk memantau apakah batas kritis dipenuhi.
- ☞ Tindakan Koreksi: Menentukan tindakan yang akan diambil jika batas kritis dilanggar.
- ☞ Prosedur Verifikasi: Menetapkan prosedur untuk memastikan HACCP berjalan efektif.

- ☛ Sistem Dokumentasi: Menyimpan catatan tentang analisis bahaya, CCP, dan prosedur HACCP.

Dalam industri perikanan, penerapan HACCP sangat penting karena produk perikanan rentan terhadap kontaminasi dan kerusakan. Dengan penerapan HACCP yang baik, pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan keamanan dan kualitas produk mereka.



Penyerahan sertifikat HACCP oleh Kepala BPPMHKP Ibu Ir. Ishartini, bersamaan dengan kegiatan Seminar Nasional di Aula Universitas Palangka Raya kepada pelaku usaha perikanan yang konsisten menerapkan sistem HACCP dalam usaha budidaya ikan betutu di Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 22 Mei 2025



Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui seluruh UPT yang ada di Indonesia, memberikan sertifikasi HACCP kepada pelaku usaha yang telah menerapkan sistem HACCP sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa produk perikanan tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diperlukan. Adapun penerapan HACCP di unit usaha perikanan meliputi:

- ☞ Pengolahan Ikan Segar : Penerapan HACCP dalam pengolahan ikan segar, seperti proses penanganan, penyimpanan, dan pengemasan, dapat mengurangi risiko kontaminasi bakteri.
- ☞ Pengolahan Ikan Beku : HACCP dapat digunakan untuk mengontrol proses pembekuan, penyimpanan, dan distribusi ikan beku, sehingga menjaga kualitas dan keamanannya.
- ☞ Pengolahan Ikan Asap : HACCP dapat digunakan untuk mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi selama proses pengasapan ikan, seperti kontaminasi mikroorganisme atau bahan kimia.

Selama tahun 2024, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah melaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan monitoring evaluasi HACCP yaitu pada bulan November 2024 di PD. Jaya Sakti yang terletak di Jl. Pasir Putih RT. 10 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun. Perusahaan ini merupakan unit usaha perikanan pembekuan udang/frozen shrimp yang telah beroperasi sejak tahun 2013 dan telah tersertifikasi HACCP. Sejak menjadi bagian dari pengguna jasa Stasiun Karantina Ikan yang kini

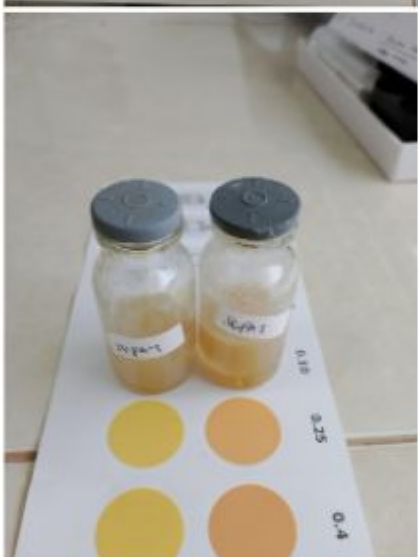
menjadi Badan Mutu, PD. Jaya Sakti terus menjadi salah satu unit usaha perikanan yang konsisten mempertahankan kualitas dan kuantitas produknya sesuai dengan SOP. Hal ini terbukti dengan hasil temuan Tim Inspektur Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah yang seluruh hasil verifikasi dinyatakan sesuai sehingga diterbitkan SKP dengan nomor 34719/62/SKP/BK/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024.

3.3. LABORATORIUM PENGUJI

Seiring dengan telah terakreditasinya sebagai Laboratorium Penguji UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah yang kini menjadi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah, sesuai Nomor Akreditasi LP-678-IDN tertanggal 13 Desember 2012 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai SNI ISO/IEC17025. Sesuai dengan Surat keputusan Komite Akreditasi Nomor : 2930/3a2/LP/05/2016 tentang Keputusan Akreditasi tanggal 20 Mei 2016 menetapkan parameter Ruang lingkup laboratorium Penguji dengan Jenis Pengujian/Sifat Yang Diukur meliputi :

- a. Mikrobiologi
 1. *Aeromonas hydrophyla*;
 2. *Edwardsiella tarda*;
 3. *Strptococcus iniae*
 4. *Aeromonas salmonicida*
 5. *Salmonella sp*
- b. Parasit
 1. *Dactylogirus sp*
 2. *Octolasmis sp*

Maka seluruh aktivitas laboratorium telah berjalan sesuai Sistem Manajemen Mutu yang ada termasuk pelaksanaan Audit Internal dan Kaji Manajemen.



Pengujian formalin terhadap sampel ikan asin yang diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan kesegaran ikan di pasar tradisional Kota Palangka Raya, yang dinyatakan positif mengandung formalin

3.3.1. Level Laboratorium

Laboratorium Pengujian UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah atau Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah merupakan satu-satunya laboratorium yang menjadi rekomendasi untuk pemeriksaan dan pengujian hama dan penyakit ikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan Laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah telah memperoleh Pengakuan sebagai Laboratorium Penguji dengan nomor Akreditasi LP-678-IDN tertanggal 13 Desember 2012 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai SNI ISO/IEC17025 serta telah direkomendasi tim auditor Eksternal dari *Quality Insurance International and Certification (QAIC)* dapat menerima Sertifikat ISO 9001:2008 hingga saat ini masih Level II.

3.3.2. Visi dan Misi Laboratorium Penguji

Menindaklanjuti hasil Kaji Manajemen yang telah ditindaklanjuti antara lain adanya perubahan sekaligus penetapan Visi dan Misi Laboratorium Penguji Tahun 2024. Adapun Visi laboratorium Penguji UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah yaitu : “Menjadi Laboratorium Penguji Level III TERBAIK di Bidang Penyakit Ikan dan Mutu Produk Perikanan” adapun Misi yang telah ditetapkan ;

1. Memberikan Pelayanan Pengujian Kepada Masyarakat Secara Profesional, Efisien dan Efektif;
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO SNI/IEC 17025:2008;
3. Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Personel Laboratorium Penguji;
4. Mengembangkan dan Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Meningkatkan Jejaring Kerja Laboratorium Penguji Penyakit Ikan dan Mutu Produk Perikanan

3.3.3. Struktur Organisasi Laboratorium Penguji

Susunan Struktur Organisasi Management Laboratorium juga mengalami perubahan sebagai hasil dari Kaji Manajemen Tahun 2024 dan telah ditindak lanjuti dengan susunan Struktur Organisasi Management Laboratorium Pengujian Mutu BPPMHKP Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Manager Puncak	: Miharjo, S.St.Pi, M.M
Manager Mutu	: Akhmad Fakhrizal Nur, S.Pi, M.Pi
Menager Administrasi	: Priyo Budi Admoko, A.Md
Administrasi dan Dokumen	: Andi Saputra, S.Pi
Penanggungjawab Alat dan bahan	: Weni Elisusanti
Petugas Pembuat LHP	: Weni Elisusanti
Menager Teknis	: Marceliya Isramawardani. S.Si
Analis Laboratorium Penguji	: Semua Pejabat Fungsional Mutu c Tenaga Teknis





Pengujian organoleptik pada sampel udang dan ikan oleh Tim penguji laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah bersama Mahasiswa Universitas Palangka Raya yang melaksanakan magang

3.3.4. Manajemen Mutu ISO 9001

Sampai tahun 2024, sistem manajemen di Kantor BPPMHKP Kalimantan Tengah telah terakreditasi ISO 9001, 17025 dan 17020 oleh Lembaga KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan telah direkomendasi tim auditor Eksternal dari Quality Insurance International and Certification (QAIC) dapat menerima Sertifikat ISO 9001:2008



3.3.5. Uji Profisiensi Laboratorium

Uji Profisiensi Berdasarkan ISO/IEC Guide 43:1997 didefinisikan sebagai suatu perangkat yang powerful untuk membantu laboratorium dalam menunjukkan kompetensinya kepada lembaga akreditasi atau pihak ketiga. Dengan kata lain uji profisiensi merupakan suatu metoda untuk mengetahui kinerja laboratorium dengan cara uji banding antar laboratorium. Uji profisiensi memungkinkan laboratorium memonitor hasil ujinya dari waktu ke waktu. Tren hasil pengujian dalam suatu jangka waktu yang cukup lama dapat diketahui, sehingga bila ada penyimpangan yang terjadi dapat segera dipikirkan tindakan perbaikannya. Biasanya dalam penyelenggaraan uji profisiensi, penyelenggara mendistribusikan suatu material yang homogen ke masing-masing peserta. Material/contoh uji yang diujikan adalah yang semirip mungkin dengan yang biasanya dianalisis oleh masing-masing laboratorium sehingga dapat merepresentasikan kemampuan masing-masing laboratorium untuk bekerja

Dengan mengikuti kegiatan uji profisiensi, akan terlihat apakah hasil uji suatu laboratorium akurat, memuaskan atau dapat diterima. Adapun tujuan utama dilakukannya uji profisiensi adalah untuk menyediakan perangkat jaminan mutu bagi laboratorium – laboratorium dalam membandingkan kinerja suatu laboratorium terhadap laboratorium lain yang sejenis, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan bila ada ketidaksesuaian.



Selama tahun 2024, Laboratorium Pengujian BPPMHKP Kalimantan Tengah menerima sebanyak 3 (tiga) sampel uji untuk dilakukan uji secara serempak. Adapun sampel uji tersebut terurai sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan Uji Profisiensi dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk dari Objek Uji Profisiensi BUSKIPM. Objek Uji Profisiensi diterima pada tanggal 24 Juli 2024 berupa isolate beku kering sebanyak 2 ampul dengan kode peserta

untuk BPPMHKP Kalimantan Tengah adalah L. 137 dan dengan kode Obyek Uji Profisiensi (OUP) 291D/2024 dan 156A/2024. Pelaksanaan pengujian dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2024. Sebelum dilakukan pengujian, Obyek Uji Profisiensi diperlakukan sesuai dengan petunjuk penerimaan Obyek Uji Profisiensi dari BUSKIPM.

Tabel Hasil Pengujian parameter *Eschericia coli* pada kegiatan uji profisiensi di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024

Parameter Uji	Kode Lab.	Kode Ampul	Hasil Uji	Hasil BUSKIPM	Kesimpulan
<i>Eschericia coli</i>	L.137	291D	Positif	Positif	Benar
		156A	Negatif	Negatif	Benar

- 2 Pelaksanaan Uji Profisiensi dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk dari Objek Uji Profisiensi BUSKIPM. Objek Uji Profisiensi diterima pada tanggal 24 September 2024 berupa isolate beku kering sebanyak 2 ampul dengan kode peserta untuk BPPMHKP Kalimantan Tengah adalah L. 137 dengan kode Obyek Uji Profisiensi (OUP) 709C/2024. Pelaksanaan pengujian dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2024. Sebelum dilakukan pengujian, Obyek Uji Profisiensi diperlakukan sesuai dengan petunjuk penerimaan Obyek Uji Profisiensi dari BUSKIPM

Tabel Hasil Pengujian Parameter *Salmonella* pada kegiatan uji profisiensi di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024

Parameter Uji	Kode Lab.	Kode Ampul	Hasil Uji (cfu/ml)	Meode Uji	Akreditasi
<i>Salmonella</i>	L.137	709C/2024	25	SNI 2332.3-2015	Tidak
		619D/2024	430.000		

- 3 Hasil Pengujian dari 2 Obyek Uji Profisiensi (OUP) yang dilakukan sesuai dengan metode uji pemeriksaan di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) pada kegiatan uji profisiensi di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024

Parameter Uji	Kode Lab.	Kode Ampul	Hasil Uji	Hasil BUSKIPM	Kesimpulan
Salmonella sp.	L073	340D	Positif	Positif	Benar
		362B	Negatif	Negatif	Benar

Hasil pengujian untuk parameter Salmonella sp. menunjukkan hasil dimana dari 2 kode OUP tersebut semua memberikan hasil yang benar yang terlihat pada Final Report BUSKIPM–LXVI/2024 Bidang Bakteriologi.



Pelaksanaan uji profisiensi oleh tim penguji laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah, pada bulan Juli tahun 2024 dengan 3 (tiga) parameter uji

Berdasarkan Hasil pengujian yang telah dilakukan, memperlihatkan bahwa analis laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah masih konsisten dalam melaksanakan instruksi kerja sehingga berhasil mendapatkan hasil yang benar sesuai hasil pengujian oleh BUSKIPM

Berdasarkan Final Report Skema Uji Profisiensi dari BUSKIPM sebagai penyelenggara dapat disimpulkan bahwa : seluruh hasil pengujian memberikan hasil yang sama dengan hasil benar dari BUSKIPM. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kompetensi personel Laboratorium SKIPM Palangka Raya dalam melakukan pengujian.

3.4. PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian.





BPPMHKP Kalimantan Tengah terus bersinergi memberikan layanan dan informasi ke berbagai instansi di Prov. Kalimantan Tengah

Pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah adalah bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dilaksanakan oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah demi memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan melayani kebutuhan masyarakat khususnya pengguna jasa perikanan.

Bentuk kemudahan dan layanan informasi yang diberikan adalah dengan disediakannya informasi-informasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pengguna jasa yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti beberapa contoh poster berikut :



FOLLOW AKUN KAMI
BPPMHPK PALANGKA RAYA

- WhatsApp: 0811-323-544
- Twitter: @BPPMHPK_PalangkaRaya
- Facebook: BPPMHPK Palangka Raya
- Instagram: @BPPMHPK_PalangkaRaya
- Telegram: @BPPMHPK_PalangkaRaya
- Google Mail: bppmhp.palangkara@gmail.com
- Tik Tok: @bppmhp.palangkara
- YouTube: BPPMHPK Palangka Raya

MAKLUMAT PELAYANAN

BAHAN PENGISI DAN PENGISI BAHAN
MAKIN RELATIF DAN PERKORAN
KALAMANTEN TENGAH

DENGAN INI MENYATAKAN, SANGGUP MENJELANGKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS SERTA BERSEDIA MENYERAHKAN SAMPEL DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Palangka Raya, 06 Januari 2024
 Kepala,
 Miharjo, S.St.Pt, M.M

BPPMHPK KALAMANTEN TENGAH
 BPPMHPK KALAMANTEN TENGAH
 Jl. Sekeloa Selatan 1, Sekeloa Selatan 1, Kota Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah
 Telp: 0561-324333, Fax: 0561-323544, Email: bppmhp.palangkara@gmail.com, bppmhp.palangkara@gmail.com



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No-5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	
1	Sertifikat di tahap Produksi Primer (adabang), CPB (gembakan), CBR (gembakan), CBR (pakan), CBR (obat ikan), CDOR (distribusi obat ikan)
2	Sertifikat di tahap Produksi Primer tangkap, CPB (kapal pendinginan), CPB based on HACCP kapal pembuat, monitoring pembungkaran ikan
3	Sertifikat di tahap Pasca Panen: SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cera Distribusi Ikan yang baik
4	Sertifikat mutu dan keamanan produk (Health Certificate HAC)
5	Pengendalian keselamatan (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
6	Pengendalian informasi produk kelautan dan perikanan konsumsi
7	Pengelolaan manajemen mutu laboratorium (pengujian dan asumsi) dan jejaring laboratorium
8	Harmonisasi SPMHP; kerjasama nasional dan internasional; registrasi ke negara mitra; penanganan kasus mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
9	Monitoring; pengawasan, penilaian; jaminan mutu, logistik, distribusi, mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik

Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor BPPMHP Kalimantan Tengah yang dipajang di ruang pelayanan

Selain memberikan kemudahan dalam informasi, BPPMHKP Kalimantan Tengah juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat pengguna jasa seperti ruang perpustakaan, ruang ibu dan anak, tempat ibadah, kemudahan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus serta fasilitas lainnya yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

3.4.1 Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik yang telah terlaksana di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024 adalah merupakan inovasi berkelanjutan dan replikasi inovasi oleh PKRI (Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik) KemenpanRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan judul inovasi "SAMPULIR" (Sistem Pelayanan Sertifikasi Mutu Perikanan dari Hulu ke Hilir). Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Aplikasi "SICANTIK" yang mendapatkan nilai 95,21 pada tahun 2020 saat penilaian Inovasi Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB dan saat itu SKIPM Palangka Raya masuk dalam kategori 10 besar.



Aplikasi SAMPULIR yang dikembangkan dari aplikasi SiCANTIK

ALUR SAMPULIR
(Sertifikasi CPIB Supplier melalui Sistem Pengujian Mutu Produk Perikanan Hulu Hilir)

- » Download melalui playstore
- » menggunakan Hand phone android
- » Ketik SAMPULIR
- » Kemudian download atau install
- » Buka aplikasinya
- » akan muncul ucapan SELAMAT DATANG
- » Silahkan pilih menu yang diinginkan

Scan disini
Kontak layanan
0811-523-584

Aplikasi SAMPULIR merupakan salah satu inovasi layanan publik yang dikembangkan oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah di tahun 2024

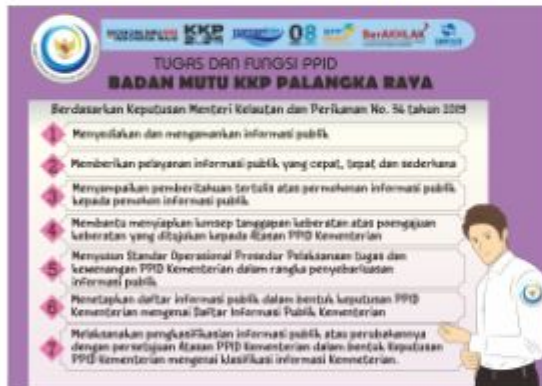
3.4.2 Layanan Publik PPID

Salah satu penilaian pelayanan public adalah tersedianya layanan PPID di suatu instansi. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan badan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan dokumentasi.

PPID berfungsi untuk mengelola informasi public, menyediakan onformasi public, memberikan layanan informasi public dan mendokumentasikan seluruh informasi yang dihasilkan atau dikelola oleh badan public.

PPID dibentuk berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. PPID dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan badan publik.

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah terus berupaya memenuhi kebutuhan informasi Masyarakat yang dengan sangat mudah diakses melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palangkaraya/>, <https://kkp.go.id/unit-kerja/bkimp/upt/stasiun-kipm-palangkaraya.html> dan media social <https://www.instagram.com/badanmutukkp.palangkaraya/>, https://x.com/BPPMHKP_PRAYA, <https://www.facebook.com/bppmhkp.palangkaraya/>, <https://www.youtube.com/@badanmutukkp.kalimantanengah>



**TUGAS DAN FUNGSI PPID
BADAN MUTU KKP PALANGKA RAYA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54 tahun 2009

1. Menyediakan dan mengemukakan informasi publik
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik
4. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID Kementerian
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik
6. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
7. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atas persubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian



**TUJUAN & PRINSIP PELAYANAN PPID
BADAN MUTU KKP PALANGKA RAYA**

Tujuan Pelayanan

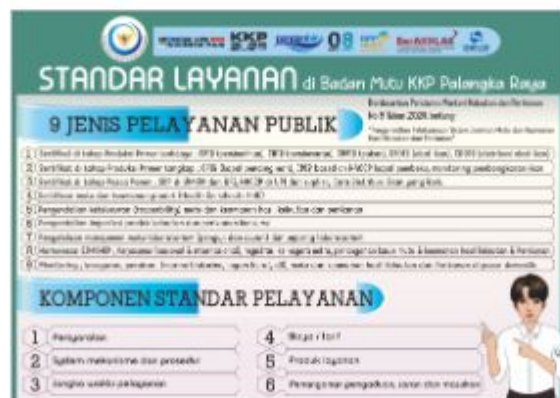
1. Tersampainya informasi atau data yang berkaitan atau anggotanya informasi publik kepada pemohon dan pengaju informasi publik
2. Tersampainya informasi yang diproses yang tidak menimbulkan informasi publik dan dengan PPID yang tidak menimbulkan informasi publik

Prinsip Pelayanan

1. Informasi publik diberikan dengan cepat, tepat, akurat, sederhana dan mudah
2. Pelayanan informasi publik diberikan secara terbuka dan jelas
3. Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon yang berkaitan dengan informasi publik yang berkaitan dengan PPID

Jenis Informasi Publik

1. Informasi umum yang wajib
2. Informasi publik yang berkaitan dengan informasi publik
3. Informasi publik yang berkaitan dengan informasi publik
4. Informasi publik yang berkaitan dengan informasi publik



STANDAR LAYANAN di Badan Mutu KKP Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54 Tahun 2009 tentang

9 JENIS PELAYANAN PUBLIK

1. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Kementerian, PPID Kementerian, PPID Kabupaten, PPID Kota, PPID Provinsi dan lain-lain
2. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
3. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
4. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
5. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
6. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
7. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
8. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya
9. Tersedia di Badan Mutu KKP Palangka Raya: PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya, PPID Badan Mutu KKP Palangka Raya

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

1. Persyaratan
2. Sistem manajemen dan prosedur
3. Tanggapan dan pelayanan
4. Biaya dan tarif
5. Prosedur layanan
6. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi



Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan bukan saja mengenai ilmu teknis perkarantina tetapi juga bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, hukum, kepegawaian, dan lain-lain.

44

1.	Teknis	: 65 buk
2.	Administrasi	: 83 bul
3.	Buku Laboratorium	: 86 bul
4.	Buletin	: 160 buk
5.	Laporan Teknis Tahunan	: 12 buk
6.	Laporan Teknis Bulanan	: 12 bu
7.	Peraturan dan Undang-undang	: 74 bul
8.	Lainlain	: 19 buk
9.	Umum	: 149 bu
Jumlah		660 buk

Adapun koleksi tersebut terurai seperti pada tabel berikut :

Tabel Daftar koleksi buku perpustakaan UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah, tahun 2024

NO.	JUDUL BUKU	PENGARANG/ DITERBITKAN OLEH
1.	Refleksi 2013, Outlook 2014	Dirjen KP3K
2.	Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2013	Pusat Data, Statistik dan Informasi
3.	KKP Dalam Gambar	Tri Asmoro/ Pusat Data Statistik dan Informasi
4.	Buku-PermenKP.No.35 tahun 2013 tentang Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	KKP/ Dirjen KP3K, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013
5.	Akuamina Edisi 77	Sinar Tani Group/PT. Duta Karya Swasta, 2014
6.	Akuamina Edisi 78	Sinar Tani Group/PT. Duta Karya Swasta, 2014
7.	Rencana Kerja Tahunan SKIPM Kelas I Palangka Raya	Stasiun KIPM Kelas I Palangka Raya, 2013
8.	Laporan Program Uji Profisiensi BUSKIPM-VIII/2013, Bidang Mikrobiologi – Pengujian Kuantitatif Salmonella	BUSKI-PM, 2013

9.	Majalah TRIAS	PT. Fajar Media Dharma Lestari, 2014
10.	Laporan Tahunan Operasional dan Administrasi 2013, Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru	Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru, 2013
11.	ROK – POK Tahun Anggaran 2014 Stasiun KIPM Kelas I Palangka Raya	Stasiun KIPM Kelas I Palangka Raya, 2013
12.	Majalah INFHEM (Vol. 4 No. 4) Edisi 04– Tahun I – Juni 2013	
13.	Peta Sebar HPI/HPIK Tahun 2012	Puskari, 2013
14.	SOP Pelayanan Operasional Perkarantina Ikan	Puskari, 2013
15.	SOP Pencegahan dan Penindakan Perkarantina Ikan	Puskari, 2013
16.	Laporan Tahunan 2013 Balai KIPM Kelas II Banjarmasin	Balai KIPM Kelas II Banjarmasin, 2013
17.	Laporan Tahunan 2013 Stasiun KIPM Kelas II Merak	Stasiun KIPM Kelas II Merak, 2013
18.	Jilid – Materi Rapat Pembekalan Pemantauan HPI/HPIK Wilayah Indonesia Tengah 2014	L. Tambunan/SKIPM P. Raya, 2014
19.	Jilid– Materi Rakornas BKIPM	L. Tambunan/SKIPM P. Raya, 2014
20.	Laporan Tahunan 2013 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan	SKIPM Kelas II Tarakan, 2014
21.	Aquamina (Koran) Edisi 81–Tahun IV, 1–15 April 2014	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
22.	Aquamina (Koran) Edisi 82–Tahun IV, 16–30 April 2014	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
23.	Laporan Tahunan 2013 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai	SKIPM Kelas II Luwuk Banggai, 2014
24.	Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Berdasarkan Konsep HACCP Pada unit Pengumpul/Supplier 2014	Pusat Sertifikasi Mutu, 2014
25.	Aquamina (Koran) Edisi 83– Tahun IV, 1–15 Mei 2014	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
26.	Aquamina (Koran) Edisi 84– Tahun IV, 16 – 31 Mei 2014	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014

27.	Laporan Tahunan Capaian Kinerja 2013 BKIPM	BKIPM, 2014
28.	Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Vol. 8, No. 1 Juni 2013	Balitbang, Balai Besar Litbang, 2013
29.	Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Vol. 8, No. 2 Desember 2013	Balitbang, Balai Besar Balitbang, 2013
30.	Squalen (Majalah/Buletin) Buletin Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Vol. 8 No. 1, Mei 2013	Balitbang, Balai Besar Balitbang, 2013
31.	Squalen (Majalah/Buletin) Vol. 8 No. 2, Agustus 2013	Balitbang, Balai Besar Balitbang, 2013
32.	Frofil Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Kal-Teng	Dinas Prov. Kalteng (Dinas Perikanan), 2013
33.	Materi (IPJ) Seminar Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2016	Leonard Tambunan, 2014
34.	Sosialisasi SPIP/Assesment Lingkup BKIPM (Materi/LPJ)	Timbul E. Ginting, 2014
35.	Laporan Tahunan Operasional Administrasi BUSKIPM Tahun 2013	BUSKIPM, 2014
36.	Kategori Tingkat Resiko Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	Puskari, 2012
37.	Majalah – Aquamina No. 89 (1 – 15 Agustus) 2014	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
38.	Aquamina, Edisi No. 90 (16 – 31 Agustus 2014)	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
39.	Aquamina, No 91 (1 – 15 September 2014)	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
40.	Aquamina, No 92	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
41.	Aquamina, No 93 (1 – 15 Oktober 2014)	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
42.	Aquamina, No 95 (1 – 15 November 2014)	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014
43.	Aquamina, No 96 (1 – 15 Desember 2014)	Sinar Tani Group, PT. Duta Karya Swasta, 2014



Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2024 oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah seluruhnya dalam kategori A "Sangat Baik"

Dari data di atas nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) diperoleh sebesar 93,97. Berdasarkan pembagian Mutu Pelayanan yang ditentukan masuk dalam kategori A atau "Sangat Baik".

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat pengguna jasa baik dalam hal pelayanan teknis maupun administrasi.

35.1 Survey Kepatuhan Pelanggan.

Tingkat kepatuhan para pelaku usaha dalam menaati regulasi perkarantina ikan BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024 berada pada level Tinggi, baik skala pelaku usaha eksportir, domestik keluar maupun domestik masuk.

Nilai Survey Kepatuhan Pelanggan tersebut diperoleh dengan melakukan pengukuran tingkat kepatuhan dalam hal administrasi, tidak adanya penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap produk perikanan yang dilalulintaskan baik di/dalam/antar area Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pengukuran berikut yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali / 2 semester:

Tabel Pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha eksportir di UPT
BPPMHKP Kalimantan Tengah Semester I (Januari–Juni 2024)
dan Semester II (Juli–Desember 2024)

SEMESTER I					
NO	Bulan	Level Kepatuhan Rata-rata	%	Nilai Kepatuhan	Keterangan
1	Januari	4	25	100	Tinggi
2	Februari	4	25	100	Tinggi
3	Maret	4	25	100	Tinggi
4	April	4	25	100	Tinggi
5	Mei	4	25	100	Tinggi
6	Juni	4	25	100	Tinggi
Rata-rata				100	Tinggi
SEMESTER II					
NO	Bulan	Level Kepatuhan Rata-rata	%	Nilai Kepatuhan	Keterangan
1	Juli	4	25	100	Tinggi
2	Agustus	4	25	100	Tinggi
3	September	4	25	100	Tinggi
4	Oktober	4	25	100	Tinggi
5	November	4	25	100	Tinggi
6	Desember	4	25	100	Tinggi
Rata-rata				100	Tinggi

Tabel Pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha Domestik Keluar
di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah Semester I (Januari–Juni 2024)
dan Semester II (Juli–Desember 2024)

SEMESTER I					
NO	Bulan	Level Kepatuhan Rata-rata	%	Nilai Kepatuhan	Keterangan
1	Januari	4	25	100	Tinggi
2	Februari	4	25	100	Tinggi
3	Maret	4	25	100	Tinggi
4	April	4	25	100	Tinggi
5	Mei	4	25	100	Tinggi
6	Juni	4	25	100	Tinggi
Rata-rata				100	Tinggi
SEMESTER II					
NO	Bulan	Level Kepatuhan Rata-rata	%	Nilai Kepatuhan	Keterangan
1	Juli	4	25	100	Tinggi
2	Agustus	4	25	100	Tinggi
3	September	4	25	100	Tinggi
4	Oktober	4	25	100	Tinggi
5	November	4	25	100	Tinggi
6	Desember	4	25	100	Tinggi
Rata-rata				100	Tinggi

Nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha Domestik Keluar di BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Semester I dan II adalah 100 % yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha Domestik Keluar masih berada pada level Tinggi.

Tabel Pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha Domestik Keluar di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah Semester I (Januari–Juni 2024) dan Semester II (Juli–Desember 2024)

SEMESTER I					
NO	Bulan	Level Kepatuhan Rata-rata	%	Nilai Kepatuhan	Keterangan
1	Januari	3,78	25	94,54	Tinggi
2	Februari	3,80	25	95,12	Tinggi
3	Maret	3,80	25	95	Tinggi
4	April	3,80	25	95	Tinggi
5	Mei	3,58	25	89,53	Tinggi
6	Juni	3,61	25	90,32	Tinggi
Rata-rata				93,25	Tinggi
SEMESTER II					
NO	Bulan	Level Kepatuhan Rata-rata	%	Nilai Kepatuhan	Keterangan
1	Juli	3,63	25	90,625	Tinggi
2	Agustus	3,57	25	89,29	Tinggi
3	September	3,54	25	88,46	Tinggi
4	Oktober	3,63	25	90,75	Tinggi
5	November	3,35	25	83,69	Tinggi
6	Desember	3,52	25	88	Tinggi
Rata-rata				88,469	Tinggi

Nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha Domestik Masuk di BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Semester I sebesar 93,25% dan pada semester II adalah 88,469 % yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha Domestik Masuk masih berada pada level Tinggi.



Sosialisasi CPiB dan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama Diskan Kab. Kotawaringin, Timur-Sampit



Sosialisasi CPIB dan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama Diskan Kab. Kotawaringin Barat - Pangkalan Bun





Dokumentasi kegiatan Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha terhadap SOP yang berlaku di Badan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sekaligus penyerahan sertifikat CBIB dan HACCP kepada pelaku usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah.



Pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan agar mudah memperoleh sertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)

3.5.2 Kerjasama

Sebagai instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP Kalimantan Tengah senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi /lembaga pemerintahan setempat, pihak swasta serta masyarakat selaku pengguna jasa layanan.

Hal ini dimaksudkan agar terjalin sinergi yang kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta bersama membangun kerjasama yang baik agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bentuk jalinan kerjasama dengan berbagai pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Udara : Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandar Udara H. Asan Sampit dan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dalam bentuk :
 - a. Penyediaan fasilitas ruangan pelayanan atau counter;
 - b. Kartu bebas masuk area (PAS Bandara);
 - c. Kerjasama dalam pengawasan Media Pembawa termasuk bila dibutuhkan menjadi saksi dalam kegiatan pemusnahan atau penahanan Media pembawa.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten se Kalimantan Tengah dalam rangka koordinasi hasil olahan produk perikanan, Magang Pegawai dan Penyuluh terkait Teknik dan Metoda Pemeriksaan HPI/HPIK serta kegiatan lainnya yang menyangkut tugas dan fungsi badan mutu.
3. BKHIT Kalimantan Tengah Raya pada setiap kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan.
4. Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) Mandingin dalam rangka koordinasi dan pemantauan produk perikanan, Magang Pegawai dan Pelatihan Teknik dan Metoda Pengamatan Penyakit Pada Ikan serta kegiatan lainnya yang menyangkut tugas dan fungsi badan mutu.

5. Bea Cukai dalam rangka koordinasi terutama pengawasan lalulintas ekspor jenis dan produk hasil perikanan.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangka Raya dalam bentuk rencana kerjasama Monitoring Kesegaran, Mutu dan Kandungan Residu Ikan dan Produk asal ika lainnya lingkup Propinsi Kalimantan Tengah
7. Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Sampit dan Pelabuhan panglima Utar Kumai Pangkalan bun, berupa kerjasama dalam bentuk informasi lalulintas produk perikanan.
8. Balai Konservasi Sumberdaya Alam, dalam hal pengawasan dari jenis-perdagangan baik nasional maupun internasional.
9. Air Line dalam hal bantuan pengawasan dan informasi jenis-jenis muatan pada setiap penerbangan yang dilaksanakan.
10. Mahasiswa dari Universitas dalam rangka penelitian dan magang terkait produk perikanan
11. Sekolah Kejuruan di Bidang Perikanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan magang dan pelatihan terkait produk perikanan.
12. Kepolisian (Koordinator Wilayah) dalam hubungan bantuan personil dan pengawasan tindak pidana pelanggaran undang-undang perikanan (Satgas PPNS).



Dokumentasi kegiatan kerjasama antara BPPMHKP Kalimantan Tengah bersama SMKN 5 Palangka Raya, Universitas Kristen Palangka Raya dan Universitas Palangka Raya







Koordinasi

- Waktu: 10-11-2024
- Tanggal: 10-04-2024, Jumat
- Lokasi: DMCCWICET
- Alamat: 801 TL
- Koordinat: 2°20'55"S, 113°04'773"E
- Kontak: 0812 3000 0000

Dokumentasi kegiatan K3 (Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama) bersama berbagai instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah

3.5.3. Penghargaan

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah yang masih tercatat sebagai Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya dengan kode Satker 649657, memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai "Terbaik Kedua" Kategori Satker dengan Transaksi Terbanyak selama tahun Anggaran 2023,

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah pada tanggal 01 Maret 2024 di Kantor KPPN Kota Palangka Raya.



Piagam Penghargaan dari Kantor KPPN Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2024.

BAB IV ADMINISTRASI & KEUANGAN

Kegiatan administrasi di lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah terdiri dari administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan inventaris barang, administrasi laboratorium serta komputerisasi. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan administrasi menjadi tolak ukur dari keberhasilan organisasi, oleh sebab itu peningkatan efektifitas kegiatan administrasi harus selalu diupayakan dan ditingkatkan. Berikut hasil kegiatan pelayanan administrasi yang telah terlaksana selama tahun 2024;



Kegiatan apel pagi setiap senin pagi oleh Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah

4.1 KETATAUSAHAAN

Administrasi Ketatausahaan merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi.

Garis besar dari kegiatan ketatausahaan di BPPMHKP Kalimantan Tengah meliputi :



Kegiatan pengarsipan yang dilakukan secara kontinyu dan mengikuti sistem pengarsipan

4.11 Surat Menyurat

Pengelolaan surat-menyurat dan pengarsipan pada UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/SJ/2010 tentang Sistem Pemberkasan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan surat-menyurat dan pengarsipannya yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan surat-menyurat dan pengarsipan dimaksud dapat diwujudkan.

Dengan adanya peraturan tersebut diatas pengelolaan surat-menyurat dan pengarsipan dapat semakin tertib baik dalam hal pengadministrasian maupun pengelolaannya.



Kegiatan pengarsipan terhadap arsip aktif dan in aktif

Selama Tahun Anggaran 2024, pengelolaan surat menyurat tercatat sebanyak 2300 total surat, dimana 643 merupakan surat masuk dan 1657 merupakan surat keluar dengan rincian jenis surat sebagai berikut;

Jenis dan jumlah surat masuk dan surat keluar di UPT
BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024

NO.	Jenis Surat / Kode	Jumlah surat		
		Masuk	Keluar	Total
1	TU	338	161	499
2	KP	69	403	472
3	KI	15	14	29
4	PL	28	182	210
5	HM	18	2	20
6	KU	11	131	142
7	OT	7	38	45
8	RC	19	15	34
9	HK	5	2	7
10	KS	3	4	7
11	PB	–	1	1
12	RSDM	–	21	21
13	HP	11	38	49
Jumlah		524	1.012	1536

Hingga tahun 2024, Kantor BPPMHKP Kalimantan Tengah secara rutin dan sistematis melakukan penataan arsip atas bimbingan langsung Arsiparis teladan BKIPM sehingga seluruh arsip persuratan, administrasi, pelayanan teknis sudah tertata dengan baik.

Arsip ditata sesuai dengan Kode Klasifikasinya. Untuk penyimpanan Arsip Aktif yaitu di Filling Cabinet dengan cara memisahkan antara Surat Masuk dan Surat Keluar per Kode Klasifikasi dan dikelompokkan berdasarkan Jenisnya atau

dengan kata lain pengelompokan arsip menurut bentuk seri dengan menggunakan folder dalam penyimpanannya. Sedangkan penyimpanan Arsip In Aktif yaitu di Ruang Arsip dengan Menggunakan ordner-ordner dan ditata dalam almari arsip sesuai dengan kode klasifikasinya dan penyimpanan secara softcopy di master komputer.





Dokumentasi pemusnahan arsip di BPPMHKP Kalimantan Tengah yang dilakukan sesuai jadwal retensinya dan sesuai dengan SOP pemusnahan arsip



Ruang arsip aktif dan in aktif BPPMHKP Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kearsipan

4.12. INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi resepabilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Laporan Barang Milik Negara BPPMHKP Kalimantan Tengah Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah.



Peralatan laboratorium untuk pengujian mutu produk hasil perikanan yang merupakan bagian dari BMN (Barang Milik Negara) yang dimanfaatkan dengan sangat baik

Saldo BMN per tanggal 31 Desember 2024 periode semester II dan Tahunan Anggaran 2024 adalah Rp. 9,708,383,270,- (Sembilan miliar, tujuh ratus delapan juta, tiga ratus delapan puluh tiga ribu, dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 9,686,649,170,- (Sembilan miliar, enam ratus delapan puluh juta, enam ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh seratus tujuh puluh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel

sebesar Rp. 21,734,100,- (Dua puluh satu juta. tujuh ratus tiga puluh empat ribu, sertus rupiah) (dikarenakan ada penghapusan Barang milik negara dan aset yang beralih ke Badan Karantina Indonesia) terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode berjalan.

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5,906,930,709,- (Lima miliar, sembilan ratus enam juta, sembilan ratus tiga puluh ribu, tujuh ratus sembilan puluh rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024
(semester II Tahun 2024)**

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	10.945.000				10.945.000	
	Sub Jumlah (I)	10.945.000	0,095237			10.945.000	0,0950572
II	Aset Tetap						
1	Tanah	2.894.875.000				2.894.875.000	
2	Peralatan dan Mesin	3.710.596.170		21.734.100		3.732.330.270	
3	Gedung dan Bangunan	4.748.612.698				4.748.612.698	
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	127.355.000				127.355.000	
5	Aset Tetap Lainnya	-				-	
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	-				-	
	Sub Jumlah (II)	11.481.438.868	99,904763			11.503.172.968	99,904943
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
2	Aset Tak Berwujud						
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-				-	
	Sub Jumlah (III)	-				-	
	TOTAL	11.492.383.868	100			11.514.117.968	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024) per perkiraan Neraca sebagai berikut:

**Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024
(semester II Tahun 2024)**

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
2	Peralatan dan Mesin	3.710.596.170		21.734.100		3.732.330.270	
3	Gedung dan Bangunan	2.953.823.000				2.953.823.000	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.355.000				127.355.000	
5	Aset Tetap Lainnya	0					
	Sub Jumlah (I)	6.791.774.170	100			6.813.508.270	100
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
2	Aset Tak Berwujud						
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-				-	
	Sub Jumlah (II)	-	0			-	0
	Total	6.791.774.170	100			6.813.508.270	100



fasilitas sarana dan prasarana di ruang aula BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

1. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024) per akun neraca adalah sebagai berikut:

Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	10.945.000	10.945.000	-
2	Tanah	2.894.875.000	2.894.875.000	-
3	Peralatan dan Mesin	3.732.330.270	3.732.330.270	-
4	Gedung dan Bangunan	2.953.823.000	2.953.823.000	-
5	Jalan dan Jembatan	-	-	-
6	Irigasi	-	-	-
7	Jaringan	12.735.500	12.735.500	-
8	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
9	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.277.292.854	3.277.292.854	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	471.980.232	471.980.232	-
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	41.390.375	41.390.375	-
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
18	Hak Cipta	-	-	-
19	Paten	-	-	-
20	Software	-	-	-
21	Lisensi	-	-	-
22	Hasil Kajian/ Penelitian	-	-	-
23	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
24	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
25	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
26	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	-	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-
29	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
30	Akumulasi Amortisasi Paten	-	-	-
31	Akumulasi Amortisasi Software	-	-	-
32	Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	-	-
33	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	-	-	-
Total		13.395.372.231	13.395.372.231	-

2. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Palangka Raya
Tahun 2020–2024 (5 tahun terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2020	13.314.943.112	13.314.943.112	100
2	2021	14.296.549.586	14.296.549.586	100
3	2022	14.296.549.586	14.296.549.586	100
4	2023	14.342.762.114	14.342.762.114	100
5	2024	9.708.383.270	9.708.383.270	100

3. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024) adalah sebagai berikut

Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada
SKIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024)

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	2.894.875.000	-
2	Peralatan dan Mesin	3.732.330.270	-
3	Gedung dan Bangunan	2.953.823.000	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.355.000	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Aset Tak Berwujud	-	-
TOTAL		9.708.383.270	-

Nilai BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2024 semester II Tahun 2024 sebanyak Nol unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp.0,-(nol)

4. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlukan untuk tingkat UAKPB)

a. Daftar BMN Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat sebanyak 0 unit adalah sebesar Rp.0,- (nol) dan kondisi rusak ringan sebanyak 0 unit sebesar Rp.0,- (nol)

b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (nol). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp.0,- (nol) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,- (nol). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan BMN Hilang Stasiun KIPM Palangka Raya
Per 31 Desember 2024 (semester II Tahun 2024)

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total			

4.2. KEPEGAWAIAN

Kepegawaian merupakan unsur penting dalam menjalankan suatu organisasi dimana kemampuan dalam menjalankan segala aktifitas kegiatan teknis dan administrasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, namun demikian jumlah pegawai dan penempatan seseorang dalam organisasi yang sesuai dengan kemampuan serta keahlian akan menentukan tingkat keberhasilan organisasi.





Pelaksanaan apel pagi secara offline dan virtual bersama
Kepala BPPMHKP Ibu Ir. Ishartini

4.2.1 Profil Pegawai

Sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) Tahun 2024 yang telah dihitung berdasarkan jumlah beban kerja unit, diketahui kebutuhan pegawai adalah sebanyak 30 Orang. Namun hingga saat ini Per Periode 31 Desember Tahun 2024 jumlah pegawai di BPPMHKP Kalimantan Tengah hanya sejumlah 20 (Dua puluh) orang yang banyak mengalami pengurangan sejak adanya pemisahan Lembaga antara BKI (Badan Karantina Indonesia) dan Badan Mutu, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pegawai di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024

NO.	Uraian	Status	Jumlah
1.	Struktural	PNS	2
2.	Inpektur Mutu Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	PNS	1
3.	Analisis Mutu	PNS	1
4.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	PNS	1
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	PNS	1
6.	Pengadministrasi Umum Urusan Umum	PNS	1
7.	Inpektur Mutu Mutu Hasil Perikanan Pertama	P3K	1
8.	Kuangan	Tenaga Kontrak	6
9.	Pengadministrasi Alat dan Bahan Lab dan Instalasi	Tenaga Kontrak	1
10.	Pengadministrasi Umum	Tenaga Kontrak	1
11.	Pramu Kantor	Tenaga Kontrak	2
12.	Satpam	Tenaga Kontrak	2
Total			20

Dengan adanya pemisahan lembaga, terjadi pengurangan jumlah pegawai di kantor BPPMHKP Kalimantan Tengah, jika sebelumnya berjumlah 34 (tiga puluh empat), kini menyisakan 20 orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang ASN P3K, dan 12 (dua belas) orang lainnya merupakan tenaga kontrak, PJLP dan outsourcing.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS dan P3K) berdasarkan jenjang pendidikannya, S2 sebanyak 2 orang, S1/DIV sebanyak 3 orang, DIII sebanyak 2 orang, SUPM/SLTA sebanyak 1 orang, seperti terlihat pada berikut ini.

Jumlah Pegawai ASN di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikannya tahun anggaran

NO.	Uraian	Tingkat pendidikan				Total
		S2	S1/D4	D3	SMU/ SUPM	
1	Struktural	1		1		2
2	Inpektur Mutu Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1				1
3	Analisis Mutu			1		1
4	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan		1			1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama		1			1
6	Pengadministrasi Umum Urusan Umum				1	1
7	Inpektur Mutu Mutu Hasil Perikanan Pertama		1		1	1
Jumlah		2	3	2	1	8



Pembimbingan pengujian sampel di laboratorium oleh pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah kepada peserta magang dari Universitas Palangka Raya

Untuk mengisi keterbatasan pegawai serta tuntutan karena pekerjaan maka kebutuhan pegawai diisi dengan pegawai kontrak dengan latar belakang pendidikan seperti pada tabel berikut ;

Data pegawai Honorer/Kontrak di UPT BPPMHKP
Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024

NO	Nama Honorer/Kontrak	Tingkat Pendidikan	Tugas	Ket.
UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah				
1.	Rastianto	SMU	Pengamanan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
2.	Marlito B	SMU	Pengamanan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
3.	Widya Agustya, S.Pi	S1 Perikanan	Teknisi Laboratorium	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
4.	Marseliya, S.Si	S1 Kimia	Teknisi Laboratorium	64/26.0/Kpts/OT- 220/VI/2017
5.	Dhesy Ruth Tambunan, ST	S1 Komputer	Administrasi Keuangan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
6.	Agus Salim	SMP	Pramubakti	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
7.	Weni Elisusanti	SMU	Pramubakti	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
8.	Fakruzzaman	S1 Ekonomi	Administrasi Keuangan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2019
9.	Handoko	S1 Komputer	Pengamanan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
10.	Dede Pratama	S1 Komputer	Pengamanan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017
11.	Eka Setiawan	SMU	Pengamanan	64/26.0/Kpts/OT-220/I/2017

4.2.2 Calon PNS di Kantor SKIPM Palangka Raya

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah tidak mendapatkan tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga jumlah pegawai masih merupakan pegawai lama dan dari hasil pengangkatan dari tenaga honorer menjadi ASN P3K.

Selanjutnya Daftar pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), daftar Nominatif, daftar Kenaikan Pangkat serta formasi jabatan di BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran.

4.2.3. Pengembangan Profesi

Selama tahun 2024, Jumlah Pegawai di BPPMHKP Kalimantan Tengah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 8 orang dengan uraian sebagai berikut :

Pegawai di BPPMHKP Kalimantan Tengah yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2024

No.	Nama Pegawai	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan / Penyelenggara
1.	MIHARJO, S.St.Pi, MM	Technical Refreshment for Fish Inspector Part 1 oleh UNIDO GQSP Indonesia dan KKP
		Technical Refreshment for Fish Inspector Part 2 oleh UNIDO GQSP Indonesia dan KKP
		Kebijakan Ekonomi Biro Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Universitas Palangka Raya dan SKIPM Palangka Raya
2.	PRIYO BUDI ADMOKO, AMd	Bimbingan Teknis Implementasi Pemberian Angka Kredit Di Lingkup Bppmhkp Oleh Badan Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
		Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Diklat Dasar Dasar Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Microlearning Mengenal dan Menghindari Gratifikasi oleh Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Seminar Nasional Kebijakan ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2024 oleh Universitas Palangkaraya
3.	HUSNI, AMd, S.Pi	Bimbingan Teknis Implementasi Pemberian Angka Kredit Di Lingkup Bppmhkp" Oleh Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
		Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Bppmhkp Oleh Sekretaris Bppmhkp

		BIMBINGAN TEKNIS PLATFORM DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA SIASN BKN DI LINGKUP BPPMHKP" oleh SEKRETARIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
		E-Learning Pengetahuan Dasar Piutang Negara Oleh Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan
		Bendahara Pengeluaran Oleh Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
4.	AKHMAD FAKHRIZAL NUR, S.Pi, M.Pi	Technical Refreshment for Fish Inspector Part 1 oleh UNIDO GQSP Indonesia dan KKP
		Technical Refreshment for Fish Inspector Part 2 oleh UNIDO GQSP Indonesia dan KKP
		Kebijakan Ekonomi Biro Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Universitas Palangka Raya dan SKIPM Palangka Raya
5.	FATIMAH, S.Pi	Seminar Nasional "Kebijakan Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas" oleh Universitas Palangka Raya
		Diseminasi Advokasi Hukum Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan KKP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Judin	Bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public oleh Kementerian kelutan dan perikanan
		Pelatihan Pelayanan Publik oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
		dasar-dasar implementasi blue economy di sektor kelautan dan perikanan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Kebijakan ekonomi biru kelutan dan perikanan menuju indonesia emas 2045 oleh SKIPM Palangka Raya
7.	Wakhid Maristy Islamanda, A.Md.	Technical Refreshment for Fish Inspector Part 1 oleh UNIDO GQSP Indonesia dan KKP
		Technical Refreshment for Fish Inspector Part 2 oleh UNIDO GQSP Indonesia dan KKP
		Kebijakan Ekonomi Biro Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Universitas Palangka Raya dan SKIPM Palangka Raya

4.3. KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari laporan realisasi keuangan, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut laporan keuangan BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024;

4.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Seluruh pelaksanaan kegiatan di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2024 sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : SP DIPA-032.13.2.649657/2023 tanggal 5 November 2024 yaitu sebesar Rp. 3.509.754.000,- (Tiga milyar limaratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Adapun perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun (selama 5 lima tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2020 – 2024

TAHUN ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2020	6.013.412.000,-	DIPA TA. 2020 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649657/2020
2021	7.028.193.000,-	DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649657/2021
2022	5.427.267.000,-	DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649657/2022
2023	6.147.668.000,-	DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649657/2023
2024	3.509.754.000,-	DIPA TA. 2024 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649657/2024

4.3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, bahkan beberapa kegiatan tidak tersedia anggaran atau jauh dibawah standar biaya umum (SBU), namun dengan komitmen dan pengabdian seluruh pegawai, kegiatan-kegiatan tetap terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja BPPMHKP Kalimantan Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

Jenis belanja DIPA di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 (Per 31 Desember 2024).

JENISBELANJA	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	KET (%)
Belanja Pegawai	1.500.346.000,	1.498.867.439,	100%
Belanja Barang	1.875.358.000,	1.858.303.854,	99%
Belanja Modal	—	—	—
TOTAL	3.375.704.000,	3.357.171.293,	99%



Pelaksanaan pengujian sampel di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah, menggunakan biaya dari APBN tahun 2024 sesuai termaktub dalam DIPA.

Dari kegiatan belanja tahun 2024 diatas, pembiayaan berasal dari :

a. Anggaran Rupiah Murni	: Rp.	3.375.704.000,
b. Anggaran PNB	: Rp.	134.050.000,
JUMLAH	: Rp.	3.509.754.000,

Selama tahun 2024, total anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar Rp. 3.375.704.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp 3.357.171.293,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi tahun 2023 dan 2024 persentasenya mengalami penurunan 0,17%, dimana tahun 2023 realisasi sebesar 99,67% namun di tahun 2024 realisasi sebesar 99,50%. Hal ini dikarenakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak mencapai target.

Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada tahun 2024

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20.000.000,-	12.868.000,-	7.132.000,-	64,34%
2	EC. 7010, Manajemen Mutu	126.000.000,-	118.869.375,-	7.130.625,-	94,34%
3	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	8.500.000,-	8.474.120,-	25.880,-	99,70%
4	WA. 3987. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	3.121.704.000,-	3.119.343.718,-	2.360.282,-	99,92%
	TOTAL	3.375.704.000,-	3.358.959.597,-	16.744.403	99,50%

4.3.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Semester II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 17.510.000,- hal ini mengalami kekurangan sebesar 48% dari yang ditargetkan. Kekurangan pencapaian dari target tersebut dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tanggal 19 Agustus 2021 dengan nilai PNBP Rp. 0,-.

Berikut data target dan realisasi PNBP di BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Perbandingan target dan realisasi PNBP UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga 2024				
No	Tahun	Target PNBP (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)	Persentase (%)
1	2020	194.927.000,-	233.920.463,-	12
2	2021	278.941.000,-	121.104.264,-	43,41
3	2022	117.130.000,-	21.391.833,-	18,26
4	2023	5.600.000,-	33.325.435,-	595.10
5	2024	21.963.000,-	11.350.000,-	51,67

4.3.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berbagai program dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik yang meliputi ; perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi.

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, maka dibentuklah suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem tersebut adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dengan SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran instansi pemerintah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka, BPPMHKP Kalimantan Tengah menjadikan penerapan SPIP menjadi tanggung jawab bersama dan masing-masing individu.

Dari pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup BKIPM di Stasiun KIPM Palangka Raya pada tahun 2024, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Laporan atas pelaksanaan SPIP di satker lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya telah disampaikan ke Sekretariat BKIPM baik dalam soft copy maupun hardcopy.
- 2) Realisasi penyerapan anggaran mencapai 99% sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- 3) Tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada

kerugian negara baik yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara maupun Pejabat lainnya pada Stasiun KIPM Palangka Raya.

- 4) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya pada tahun 2024 dapat disampaikan secara tepat waktu, pimpinan tetap berkomitmen untuk menerapkan SPIP lingkup BKIPM dengan mengimplementasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Untuk meningkatkan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Stasiun KIPM Palangka Raya dan penyampaian laporan SPIP secara efisien dan tepat waktu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya. Selain itu, juga meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP dilakukan per triwulan, dan sosialisasi mengenai pelaporan SPIP.



Pelaksanaan pelatihan oleh seluruh pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai upaya meningkatkan IP ASN.

BAB V PERMASALAHAN & USULAN

Secara umum seluruh kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang meliputi kegiatan ; administrasi, pelayanan teknis, pengawasan dan pengendalian seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target kinerja. Kendatipun terdapat hambatan dalam melaksanakan tugas, hal tersebut tidak menjadi kendala bagi UPT KIPM Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena telah menjadi komitmen bagi KIPM Palangka Raya untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat meskipun dalam banyak keterbatasan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya terurai sebagai berikut :

5.1 PERMASALAHAN

1. Beban tugas yang semakin lama semakin meningkat, pelayanan yang serba cepat, online dan transparan, banyaknya aplikasi-aplikasi baru serta banyak tantangan lainnya, menuntut seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar mampu bekerja dan lebih produktif serta inovatif.
2. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pekerjaan menjadi tumpang tindih dan melebihi beban kerja.
3. Terbatasnya peralatan laboratorium dalam mendukung pemeriksaan kualitas mutu produk perikanan.

4. Kurangnya buku literature/referensi tentang parameter mutu dan metode pengujian mutu ikan.
5. Perlunya kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM
6. Perlu dilakukan penambahan anggaran.

5.2 USULAN

Kendatipun terdapat permasalahan, UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi agar pelayanan kepada pengguna jasa dan adminitrasi tetap berjalan dengan baik. Namun sebagai usulan dan permohonan adalah :

1. Mengusulkan adanya TAMBAHAN PEGAWAI sejumlah 11 Orang secara bertahap selama 5 tahun ke depan untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih terhadap pekerjaan serta dapat membantu dalam melakukan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan sehingga Analisa Beban Kerja (ABK) terlaksana dengan baik dan masing-masing personil bisa bekerja sesuai tupoksinya.
2. Perlunya kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM
3. Perlu dilakukan penambahan anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Menjelang akhir tahun 2024 dan menyongsong tahun 2025, ucap syukur dan terima kasih tak henti-hentinya dipanjatkan kepada Tuhan YME yang dengan segala kekuasaanya, telah memberikan anugerah yang tak terhingga, sehingga seluruh kegiatan di tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Berbagai macam tantangan, kendala dan peluang telah dilalui Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya yang kini berubah menjadi Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, namun berkat kerja keras dan komitmen untuk tetap bersama membangun Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah menjadi kunci utama, sehingga sampai akhir tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah masih tetap menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terus memberikan pelayanan prima kepada seluruh stake holdersnya dan berharap akan terus meningkatkan pelayanannya dan lebih sukses di tahun-tahun mendatang dalam segala bidang.

Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban BPPMHKP Kalimantan Tengah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berisikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024, baik kegiatan administrasi, informasi, pelayanan teknis dan pengawasan / pengendalian yang seluruhnya telah terealisasi.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran telah terealisasi sebesar 99% dari PAGU anggaran sebesar Rp 3.375.704.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 3.357.171.293,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan sebesar 51,67%, dibandingkan tahun 2023. PNBP ditargetkan selama tahun 2024 sebesar Rp. 21963.000,- dengan realisasi Rp. 11350.000,-

Demikian laporan hasil kegiatan tahun 2024 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi BPPMHKP Kalimantan Tengah di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan BPPMHKP Kalimantan Tengah banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.



1



2



3

Gedung SKIPM Palangka Raya dari masa ke masa

- ① Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palangka Raya
- ② Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya
- ③ Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah



Meski instansi tak lagi bersama,
namun sinergi kan terus terjalin
tanpa kata akhir,
demi Kalteng kita maju bersama

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah berdasarkan
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun anggaran 2024

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PER : 11 JUNI 2024 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKA RAYA												
NO	DATA PEGAWAI			PANGKAT		JABATAN		MASA	LATIHAN	PENDIDIKAN		USIA
	FOTO	NIP	NAMA PEGAWAI TEMPAT/TEL LAHIR	GGJ/ RUMAH	TMT	NAMA	TMT	KELOMPOK	NAMA	TMT	PROG. STUDI	
1		PR000000000000	Miharga, S.Si, Pi, Mm. Semanggi, 01/01/1974	01/01	01/01/2019	KEPALA STASIUN PALANGKA RAYA	01/01/2019	01 TK, 01 BK	01/01/2019	01/01	Manajemen	49 thn
2		PR000000000000	PRIYO BUDI ADMOKO, A.MD Semanggi, 01/01/1980	01/01	01/01/2022	KEPALA BRIGAD PEMERINTAH	01/01/2022	01 TK, 01 BK		01/01	Manajemen	43 thn
3		PR000000000000	HUSNI, A.MD, S.PI Semanggi, 01/01/1980	01/01	01/01/2020	PENGASAHING/STASI KEPERAWAN	01/01/2020	01 TK, 01 BK		01/01	Manajemen/Gender Duga Perempuan	43 thn
4		PR000000000000	JUDIN Ampel Palangraja, 21/11/1976	01/01	01/01/2020	PENGELOLA STASI	01/01/2020	01 TK, 01 BK		01/01	STTA	47 thn
5		PR000000000000	IKHAMAD FAKHRIZAL NUR, S.PI, M.PI Pangkajene, 10/10/1981	01/01	01/01/2021	PIKSI PELAKSANA	01/01/2021	01 TK, 01 BK		01/01	Studi/Manajemen	42 thn
6		PR000000000000	FATIMAH Jang Pandang, 01/01/1980	01/01	01/01/2022	PRAMUKA KIPM PALANGKA RAYA	01/01/2022	01 TK, 01 BK		01/01	Studi/Manajemen	44 thn
7		PR000000000000	WAKHD HIRSYI ISLAMWATI, A.MD Sedaya, 01/01/1993	01/01	01/01/2020	PENGASAH PERIKANAN PALANGKA RAYA	01/01/2020	01 TK, 01 BK		01/01	Agronomi	30 thn
8		PR000000000000	MARSELINA ISRAMAWARDANI, S.Si Sedaya, 10/01/1993	01/01	01/01/2024	INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AIR PERAIRAN	01/01/2024	01 TK, 01 BK		01/01	Analisa Kimia	30 thn
DAFTAR PEGAWAI HONORER / KONTRAK / PJLP/OUTSOURCING												
NO	NAMA HONORER/KONTRAK / PJLP/OUTSOURCING			TINGKAT PENDIDIKAN		TUGAS		KET.				
1		RASTIANTO Palangraja, 01/01/1970		SMU		PENGAMANAN		2017				
2		MARLITO BAHASEMAL Sedaya, 01/01/1980		SMU		PENGAMANAN		2017				
3		DESHY RUTH HANNITA T., S. KOM Bangkajene, 01/01/1980		SI - KOMPUTER		ADMINISTRASI KEUANGAN		2017				
4		AGUS SALIM Palangraja, 01/01/1981		SMP		PRAMUBAKTI		2017				
5		WENI ELISUSANTI Tambak, 01/01/1981		SMU		PRAMUBAKTI		2017				
6		FAKRUZZAMAN, SE. Palangraja, 01/01/1980		SI - EKONOMI		ADMINISTRASI KEUANGAN		2019				
7		DEDE PRATAMA, S.KOM Sedaya, 01/01/1980		SI - KOMPUTER		ADMINISTRASI KEUANGAN		2017				
8		EKA SETIAWAN Palangraja, 01/01/1981		SMU		PRAMUBAKTI		2017				
9		ANGELA MERICCI, S.PI Bontak, 01/01/1991		SI - PERIKANAN		ADMINISTRASI PERSURATAN		2023				
10		ANDY SAPUTRA, S.PI Palangraja, 01/01/2000		SI - PERIKANAN		TEKNIK LABORATORIUM		2024				
11		HANDOKO, S. KOM Sedaya, 01/01/1980		SI - KOMPUTER		PENGAMANAN		2017				
12		FERY KUSWANTO, SE. Palangraja, 01/01/1980		SI - EKONOMI		PENGAMANAN		2017				